

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi dari setiap kalangan akan sangat berbeda karena banyak faktor yang dilalui dari setiap kalanganpun berbeda baik dari sisi sudut pandang dalam penginderaan, lingkungan bahkan pengetahuan. Adanya perbedaan seperti inilah yang membuat seseorang memberikan respon positif atau negatif terhadap sesuatu objek. Hal tersebut tergantung bagaimana seseorang menanggapi objek yang dituju sesuai persepsinya. Persepsi sebagai mekanisme melalui stimuli lingkungan hingga mencapai kesimpulan akhir bahwa persepsi memberikan reaksi terhadap pembentukan pemahaman dengan perilaku.

Manusia juga sebagai makhluk individu dan sosial tentunya memiliki beragam kebutuhan dan keinginan yang harus di penuhi. Kebutuhan menurut teori Maslow menjadi acuan utama dari kebutuhan manusia yang terbagi menjadi lima bagian. Pertama kebutuhan psikologis manusia yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berlindung (rumah) dan pertolongan dari kesusahan. Kedua kebutuhan akan keamanan yaitu kebutuhan manusia akan kebebasan dari ancaman atau keamanan atas kejadian atau lingkungan yang mengancam. Ketiga, kebutuhan akan rasa memiliki, social, dan kasih sayang yang meliputi kebutuhan akan persahabatan, persatuan, interaksi dan kasih sayang. Keempat, kebutuhan manusia akan penghargaan baik terhadap diri sendiri maupun dari orang lain. Terakhir, kebutuhan akan menunjukkan diri yang sebenarnya yaitu kebutuhan manusia untuk memenuhi diri sendiri dengan memaksimalkan penggunaan dari kemampuan, keahlian, dan potensi diri. Beragam kebutuhan diatas merupakan motivator bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan yang nyata agar kebutuhannya terpenuhi.

Sayangnya, tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang dibenarkan. Adanya hambatan – hambatan seperti perbedaan kepentingan,

tekanan dari lingkungan keluarga maupun kerja, gaji yang rendah dan sedikitnya penghargaan yang diterima memotivasi seseorang untuk mengambil jalan pintas dengan melakukan kecurangan. Kecurangan merupakan keterbatasan yang membatasi ketidakjujuran individu atau manusia dalam melakukan suatu tindakan, Dalam akuntansi dikenal dua jenis kesalahan yaitu kekeliruan (*error*) yang mengandung unsur ketidaksengajaan dan kecurangan (*fraud*) yang biasa dilakukan dengan unsur kesengajaan.

Seiring perkembangan dunia usaha yang sangat kompleks, maka perkembangan *fraud* sangatlah meluas baik di sektor swasta ataupun sektor publik. Pada sektor swasta, banyak terdapat penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan seseorang dalam menafsirkan catatan keuangan. Hal ini menyebabkan timbulnya kerugian bagi pekerja bahkan investor yang menanamkan dananya di perusahaan terkait.

Salah satu contohnya yakni pada kasus kimia farma, Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

. Dengan demikian untuk mengembalikan kepercayaan para investor, diperlukan praktik akuntansi yang sehat dan audit yang berkualitas dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Sementara itu pada sektor publik, di Indonesia korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas. Semenjak runtuhnya zaman

orde baru, masyarakat semakin kritis dan tanggap dalam mencermati kebijakan-kebijakan pemerintah terutama dalam praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang bisa disebut dengan istilah KKN. Fraud jenis ini sulit dideteksi karena para pihak saling bekerja sama untuk menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya penyalahgunaan wewenang, penerimaan secara illegal dan pemerasan ekonomi. Karena memaraknya korupsi yang sudah bukan lagi rahasia publik mulai terjadi sejak tahun 2008-2009, oleh karena hal tersebut pemerintah membuat UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum berhasil menuntaskan masalah korupsi yang merajalela.

Permasalahan dan solusi dalam menangani korupsi biasanya hanya di pandang dari sudut ekonomi, sosiologi, budaya, sistem pemerintah dan hukum. Namun, pada segi akuntan masih jarang terlihat kontribusi nyata untuk melawan *fraud*. Selain itu, dalam hal penanganan kasus *fraud* dikalangan sektor swasta maupun sektor publik diperlukan *fraud auditor* yang handal dan memiliki independensi yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan memiliki solusi handal untuk mencegah terjadinya *fraud* yang makin memarak. Keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN juga ditandai ketika memasuki abad ke-21. Indonesia bersama dengan negara lainnya bersepakat untuk memberantas praktek korupsi dengan adanya berbagai lembaga survei atau penelitian baik di Indonesia atau bahkan di luar negeri yang menyebutkan bahwa fenomena korupsi di Indonesia sudah sangat parah. *Transparency International* (TI) merupakan organisasi masyarakat madani yang mempelopori pemberantasan korupsi.

Dalam literatur akuntansi dan auditing *fraud* di terjemahkan sebagai praktik kecurangan dan *fraud* sering diartikan sebagai *irregularity* atau ketidakteraturan dan penyimpangan. Selama hampir satu dekade belakangan ini terdapat dua jenis kejahatan dunia, dan salah satu dari kejahatan tersebut adalah kejahatan keuangan berupa *fraud* atau korupsi. Kejahatan atas *fraud* yang sangat katastrofik dan menggemparkan dunia salah satunya terjadi di Amerika Serikat yaitu Enron Inc. Enron dilahirkan dari merger atau penggabungan antara Houston Natural Gas dengan

InterNorth suatu perusahaan pipa gas alam di Nebraska, Jeffrey Skilling yang memiliki pengalaman di perbankan. Ia merekomendasikan bisnis Enron menjadi “gas bank” yaitu membeli dan menjual gas alam. Begitu pesat pertumbuhan Enron sama halnya seperti kebangkrutannya. Kebangkrutan Enron bukan hanya membawa kerugian kepada pemegang saham Enron, kreditor, pegawai dan rekanan Enron tetapi juga membawa dampak yang mengejutkan dan gelinding salju atas runtuhnya Arthur Andersen saat itu yang merupakan kantor akuntan publik terbesar di dunia. Masalah dan praktik kejahatan terkait keuangan yang terjadi dapat kita lihat dari skandal-skandal keuangan seperti kasus Enron tersebut dan kasus-kasus lainnya. Skandal-skandal tersebut telah mengejutkan dunia dan membuka mata para penggelut dunia bisnis untuk lebih memberi perhatian terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam dunia bisnis khususnya masalah keuangan.

Maka dari itu, akuntansi sebagai bahasa bisnis tentunya harus ikut andil dalam melawan dan mengatasi permasalahan tersebut. Dalam usaha untuk melawan permasalahan dan praktik kejahatan tersebut, akuntansi dituntut untuk berkembang agar dapat mengikuti perkembangan bisnis dan tren permasalahan yang mengikutinya terutama yang terkait dengan *fraud*. Selama ini akuntansi yang dikenal untuk mendukung kelancaran suatu bisnis hanya akuntansi biaya, akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, dan auditing saja. Padahal bidang-bidang akuntansi tersebut belum dapat memberikan solusi terkait masalah *fraud*. Audit yang biasanya digunakan dan diharapkan dapat menangani *fraud* memiliki keterbatasan sehingga dapat dikatakan kurang berhasil dalam mengatasi masalah *fraud*. Keterbatasan tersebut dikarenakan audit hanya menekankan pada penemuan kesalahan dan keteledoran pada laporan keuangan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, berkembanglah ilmu akuntansi forensik. Akuntansi forensik menurut Tuanakota (2014, h 4) adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Akuntansi forensik memiliki sifat “*problem-based*” dan lebih menekankan pada keanehan (*expection, oddities, irregularities*) dan pola tindakan (*product of conduct*)

pada laporan keuangan. Akuntansi forensik juga lebih menekankan tinjauan analitis dan teknik wawancara mendalam pada prosedur utamanya sehingga diharapkan dapat mendeteksi adanya atau timbulnya *fraud*. Dengan begitu akuntansi forensik diharapkan menjadi solusi permasalahan *fraud* yang saat ini banyak ditemukan.

Sebenarnya sudah banyak permasalahan terkait dengan *fraud* yang sudah diselesaikan menggunakan akuntansi forensik. Di Amerika, akuntansi forensik sudah ada sejak kasus yang terkenal dengan nama kasus Al Capone pada 1931 terungkap. Kasus tersebut hanya bisa diselesaikan dengan akuntansi forensik saja. Berkat terkenalnya keberhasilan akuntansi forensik dalam kasus tersebut, Dinas Pajak Amerika Serikat sampai membuat slogan “Hanya akuntan yang dapat menangkap Al Capone”. Selain itu, penggunaan akuntansi forensik dalam teknik audit juga telah berhasil membongkar skandal-skandal keuangan seperti kasus Enron, WorldCom, Qwest, Global Crossing, dan lainnya. Skandal-skandal keuangan tersebut akhirnya membuat *Sarbanes-Oxley Act* muncul di Amerika. Menurut Tuanakota (2010, dalam Tuanakota, 2014), hal itulah yang mendorong akuntansi forensik semakin berkembang. Di Indonesia, akuntansi forensik sebenarnya telah dipraktekkan sejak krisis keuangan pada tahun 1997. Kasus pertama yang diselesaikan dengan menggunakan akuntansi forensik di Indonesia adalah kasus Bank Bali oleh *Pricewaterhouse Coopers* (PwC). Selain itu terdapat pula kasus sengketa antara PT Telkom dan PT Aria West International (AWI) pada tahun 2003 yang juga melibatkan penggunaan akuntansi forensik. Perkembangan akuntansi forensik memang terbilang sedikit terlambat dibandingkan dengan bidang akuntansi yang lain. Ilmu akuntansi forensik sudah ada sejak tahun 1931 (kasus Al Capone) di Amerika, namun organisasi profesi akuntan forensik di Amerika yaitu *Association of Certified Fraud Examiners* baru terbentuk pada 1988. Dalam bidang pendidikan, *American College of Forensic Examiners*, kampus untuk ilmu akuntansi forensik juga baru berdiri pada 1992.

Akuntansi Forensik di Indonesia sudah banyak dilaksanakan oleh berbagai lembaga baik negeri ataupun swasta seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kantor-kantor akuntan publik (KAP). Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tercatat menerapkan akuntansi forensik di Indonesia pun masih terbilang sangat sedikit, contohnya adalah *Price Waterhouse Cooper (PwC)*. Menurut Tuanakota, belum banyak KAP atau lembaga lainnya yang punya kesempatan menerapkan akuntansi forensik karena spesialisasi forensik belum banyak dilirik di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan perlunya keahlian akuntansi plus untuk menguasai akuntansi forensik (hukumonline.com,07 februari 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, sangat penting dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat persepsi mahasiswa, akademisi dan praktisi dalam menanggapi akuntansi forensik. Dengan demikian penelitian ini diberi judul “**Persepsi Akademisi, Mahasiswa dan Praktisi terhadap Akuntansi Forensik (Studi empiris Univ.Bhayangkara Jaya, KAP wilayah Kota Bekasi dan BPKP DKI Jakarta)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti mengemukakan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan praktisi terhadap akuntansi forensik?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi akademisi dan mahasiswa terhadap Akuntansi Forensik ?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa dan praktisi terhadap Akuntansi Forensik?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai persepsi terhadap teori dan praktik akuntansi forensik, relevansi akuntansi forensik dan perbedaan persepsi tentang akuntansi forensik menurut persepsi akademisi dan mahasiswa lingkup Univ.Bhayangkara Jaya dan praktisi lingkup KAP wilayah kota bekasi dan BPKP DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang di dapat dalam dunia nyata khususnya mengenai akuntansi forensik.

1.4.2 Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka peneliti menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik dari kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai berbagai teori dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, menguraikan secara ringkas peneliti terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sample, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variable penelitian dan definisi operasional, instrument penelitian dan teknik analisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek penelitian, analisis data, pengujian atas hipotesis penelitian dan pembahasan hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, saran-saran bagi pihak terkait serta keterbatasan penelitian.

